

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan entitas yang terus berkembang yang hidup dalam proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil proses interaksi yang terus menerus antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada pengaruh timbal balik antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial (Soetomo, 2009).

Menurut Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko (1984) bahwa masyarakat adalah realitas objektif yang independen tanpa individu sebagai anggotanya. Perusahaan sebagai kumpulan orang yang memiliki sejumlah elemen termasuk.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah hubungan seseorang atau pun sekelompok orang yang hidup berkelompok atau sendiri-sendiri dan saling berinteraksi saling mempengaruhi dan menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan. Dalam masyarakat kepentingan dilindungi oleh setiap individu atau kelompok yang akan bertindak dan menentukan pola-pola strategis untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini gerakan sosial sering digunakan sebagai alat yang ampuh untuk mendukung suatu tujuan yang dapat dicapai.

Gerakan itu sendiri adalah suatu kegiatan sosial berupa suatu gerakan dari suatu jenis tindakan kelompok yaitu suatu kelompok informal membentuk suatu organisasi sejumlah orang individu yang memusatkan perhatian secara khusus

pada suatu isi kegiatan tertentu sosial udaya dan isu-isu politik. kampanye penolakan atau perubahan sosial(Widyanta, 2002). Gerakan masyarakat ini umumnya terentuk dalam dua entuk yaitu gerakan sosial dan politik.

Gerakan sosial adalah gerakan yang ertujuan untuk mengadukan ketidaksetaraan sosial tertentu atau masalah sosial. Gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengejar keaikan ersama atau mencapai tujuan ersama melalui tindakan kolektif. Sidney tarrow (2005) memandang gerakan sosial seagai protes politik yang terjadi ketika orang-orang iasa ergaung dengan kelompok yang leih erpengaruh yang erunjuk rasa melawan elit otoritas dan partai.

Sedangkan gerakan politik adalah perilaku kolektif yang ercirikan kepentingan ersama dan tujuan jangka panjang untuk menguah atau mempertahankan masyarakat atau lemaga-lemaga yang ada di sana. Ciri lain dari gerakan politik adalah penggunaan metode yang ereda di luar institusi yang ada (Kamanto Sunarto, 2004).

Gerakan politik merupakan entuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik yang secara signifikan ereda dengan partai politik dan kelompok kepentingan. Gerakan sosial politik merupakan aspek dinamis kehidupan politik yang sering terjadi di masyarakat terutama di kalangan masyarakat yang sedang mengalami kenaikan ekonomi sosial udaya dan terutama politik. Gerakan politik juga diasosiasikan dengan gerakan sosial.

Suharko (2006:8) menyatakan bahwa ada banyak jenis gerakan sosial antara lain: (1) Gerakan Doors yaitu gerakan yang bertujuan untuk mengubah atau menentang keadaan kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis gerakan sosial yang paling tersebar luas di sebagian besar negara industri. (2) Gerakan regresif gerakan yang bertujuan untuk memulihkan perubahan sosial atau melawan gerakan maju. Gerakan politik juga sangat dekat dengan tuntutan perubahan sosial.

Menurut Maran (2001), gerakan politik adalah suatu usaha yang kurang lebih terorganisir dan keras yang dipimpin oleh sejumlah orang untuk membawa perubahan atau menentangnya. Oleh karena itu gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang terorganisir secara longgar tanpa sarana yang dilemakan untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Beberapa kasus telah menimbulkan gerakan masyarakat yaitu sengketa tanah.

Sengketa dan konflik tanah telah muncul di banyak wilayah di Indonesia. Masalah ini bukan masalah yang bisa diselesaikan sesekali. Permasalahan sengketa dan konflik pertanahan telah menyebabkan banyak korban kehilangan tanah tempat tinggal mata pencaharian keluarga bahkan kehidupan. Padahal tujuan negara ini sebagaimana termaktu dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu upaya penyelesaian segala macam sengketa pertanahan dan konflik yang menimbulkan penderitaan bangsa pada anak merupakan upaya untuk mencapai cita-cita konstitusi dan oleh karena itu juga harus masuk dalam agenda konstitusi bangsa (Sori, 2014:7).

Penyelesaian konflik pertanian selama ini mencerminkan rasa keadilan yang tidak memadai dan atau tidak terpenuhi terutama bagi kelompok masyarakat tertentu yang bergantung pada tanah dan sumber daya alam seperti petani nelayan dan masyarakat adat. Bagi mereka penguasaan tanah dan sumber daya alam merupakan syarat mutlak untuk menjamin keamanan dan kelestariannya. Namun konflik pertanian mengganggu kondisi kelangsungan hidup mereka. Selain ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam konflik ada juga berupa kekerasan pengucilan eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh pejabat negara perusahaan skala besar dan proyek lainnya (Tim, 2014:18).

Praktik kekerasan pengucilan dan penindasan menyekam sejumlah kebijakan publik yang tidak sejalan dengan keinginan dan kepentingan para korban terutama para petani kecil miskin yang seringkali menguasai sedikit atau tanpa tanah (no land). Kelompok tani yang menguasai tanah yang luas atau bahkan menguasai tanah yang luas dapat mengalami ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan oleh negara dan aparatnya ketika hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasainya dialihkan kepada pihak lain tanpa ganti rugi yang memadai atau tanpa kompensasi (Tim, 2014:19).

Perselisihan dan konflik pertanahan semakin meluas. Masih dalam ingatan kita bahwa konflik di Mesuji Lampung pada tahun 2012 mengakibatkan tewasnya beberapa pihak yang tertikai. Baru-baru ini di Karawang petani menolak mengolah 350 hektar lahan tempat tinggal dan mencari penghidupan dengan dalih menerapkan putusan pengadilan yang memenangkan PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land (APL) di atas

tanah masyarakat. Kekerasan dan intimidasi tidak bisa dihindari. Komunitas menghadapi sekitar 7.000 petugas bersenjata lengkap di antara pelaksanaan eksekusi. Semilan petani dan empat uruh yang melawan eksekusi ditangkap 10 uruh lima petani dan satu pelajar luka-luka satu petani tertetak dan puluhan lainnya luka-luka. Masyarakat ikut serta karena menganggap putusan pengadilan tidak adil karena mengusir mereka yang sudah lama tinggal di sana membangun desa menjadi desa tua dan memiliki perangkat desa fasilitas umum dan sosial masyarakat yaitu sebanyak 420 orang keluarga. (Arizona, 2014:8).

Tak berapa lama setelah bentrok antara petani dengan pihak keamanan dalam proses eksekusi, pada tanggal 17-18 Juli 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Karawang (Ade Swara) bersama istri dan enam orang lainnya termasuk pihak perwakilan dari PT. Agung Podomoro Land. Tangkap tangan itu terkait dugaan gratifikasi dalam pengurusan izin tata ruang untuk mempergunakan tanah yang sedang mengalami konflik dengan petani. Operasi ini menunjukkan bahwa permasalahan dibalik permasalahan konflik agraria ada saja pihak-pihak yang melakukan cara kotor untuk mengalahkan masyarakat. Pada waktu yang hampir bersamaan, sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Rembang melakukan protes terhadap perusahaan PT. Semen Gresik (sekarang PT. Semen Indonesia) yang melakukan operasi pembukaan tambang karst di pegunungan Kendeng yang hanya berjarak 500 meter dari pemukiman dan lahan pertanian mereka. Pasti pembangunan pabrik semen itu akan berdampak kepada masyarakat sekitar

yang akan menghirup debu-debu yang hinggap di atas rumah dan ditanaman-tanam hasil pertanian mereka (Arizona,2014:9).

Situasi konflik ini semakin menunjukkan bahwa hukum tidak dapat tampil sebagai kekuatan penyeimbang antara rakyat biasa di hadapan penguasa. Bahkan organisasi hukum sering melegitimasi tindakan impersonal orang kecil. Pada saat yang sama dapat dikatakan bahwa lembaga penegak hukum tidak cukup untuk menyelesaikan sengketa dan konflik tanah yang semakin esar dan meluas. (Arizona, 2014:9).

Dapat dilihat bahwa ada dua jenis sengketa tanah yang diklasifikasikan menurut faktor-faktor yang terlihat dalam sengketa tersebut. Pertama konflik pertanian vertikal khususnya konflik pertanian yang diseakan oleh kebijakan negara mengenai penggunaan tanah air dan segala isinya. Kedua sengketa tanah horizontal yaitu sengketa tanah yang melibatkan dua orang atau lebih yang menyangkut kepemilikan hak atas tanah (Zuhelmy, 2010:13).

Secara garis esar sengketa tanah secara umum dapat dilihat sebagai sengketa hak atas tanah baik pertanian perkebunan maupun pertambangan antara mantan petani dengan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan tanah. (Kalo, 2010).

Kebijakan hukum pertanian di Indonesia tidak lepas dari eragai persoalan tersebut di atas. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Pertanian yang juga dikenal dengan UUPA memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada negara atas sumber daya pertanian dengan konsep yang dikenal sebagai “hak menguasai” penguasaan negara (HMN).

Konsep tersebut awalnya dibuat untuk menghilangkan konsep reclaimed domain yang selama ini dianut oleh pemerintah kolonial untuk “merampas” tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Dalam perkembangannya HMN ini dalam penerapannya sangat mirip dengan konsep domain pertambangan pada masa kolonial. (Zakie, 2016:41).

Hingga saat ini konflik tersebut belum dapat diselesaikan secara memuaskan bahkan cenderung mandek dalam proses penyelesaiannya. Soal persoalan tersebut memiliki tingkat kerumitan yang tinggi yakni menyangkut hukum politik ekonomi dan hak-hak masyarakat lokal. Pada gilirannya akibat yang terjadi adalah dilupakannya hak-hak mereka yang sebenarnya telah mengelola sebagian tanah atau tanah secara turun-temurun.

Desa Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir merupakan desa yang bersengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis Ogan Ilir. Sengketa disebabkan kepemilikan lahan yang telah didiami oleh masyarakat selama bertahun-tahun dan PTPN VII Cinta Manis Ogan Ilir mengklaim bahwa tanah tersebut adalah hak milik PTPN VII Cinta Manis sah secara hukum. Tanah telah menjadi tempat tinggal masyarakat selama bertahun-tahun dan telah didirikannya rumah sebagai tempat tinggal oleh masyarakat.

Konflik yang terjadi khususnya pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 aksi protes yang dilakukan oleh individu dan kelompok kecil petani sering disebut dengan aksi protes kolektif. Sejak 1997 hingga 2008 perlawanan memasuki masa pergerakan yang ditandai dengan penegasan bahwa tujuan

utama perjuangan adalah merebut kembali tanah PTPN VII. Pada tahun 2009 gerakan perlawanan masyarakat memasuki fase konfrontasi erdarah dan pengadilan ulang. Episode ini menyoroti bahwa gerakan ini telah mengadopsi metode dan taktik repertoar untuk menghadapi PTPN VII. Intensitas perlawanan menciptakan interaksi perlawanan antara kedua elah pihak yang menunjukkan pilihan untuk mereklamasi dan redistribusi tanah pada tahun 2011 hingga saat ini masih bergulir.

Proses penyelesaian sengketa yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat dengan perusahaan. Namun persoalan ini belum terselesaikan secara optimal. Sampai saat ini konflik masih sering terjadi bahkan telah melahirkan bentrokan-bentrokan akibat dirugikan dan kebijakan pemerintah setempat yang tidak memihak kepada masyarakat. Penyelesaian sengketa agraria ini harus dilakukan dengan maksimal karena berimbas pada hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang tentunya berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan permasalahan tentang sengketa tanah antara masyarakat desa Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu dan PTPN VII Cinta Manis di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **GERAKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DENGAN PTPN VII CINTA MANIS(STUDI KASUS DI DESA SERI BANDUNG KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa pokok masalah yang dikaji oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gerakan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis?
2. Bagaimanapaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gerakan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis.
2. Untuk mengetahui upaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat memberikan landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis politik agraria khususnya tentang sengketa tanah.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi penunjang untuk melatih kemampuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan-perusahaan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian di perlukan hasil-hasil penelitian yang telah adasebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut:

Riza Zuhelmy, “*Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Bengkalis Provinsi Riau).*” (Zuhelmy, 2010:2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab persengketaan kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat dan upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian politik agraria yang tidak berpihak pada rakyat (studi kasus pada sengketa lahan antara PTPN Cinta Manis dengan masyarakat desa Betung kecamatan Payaraman Ogan Ilir.

Irfan Yoginawa Rifma Dewa, “*Politik Agraria Di Daerah Istimewa : Konflik Hak Kepemilikan dan Penguasaan Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Gunungkidul*” (Dewa, 2016:40). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konflik hak kepemilikan dan penguasaan tanah pada kawasan Sultan Ground di pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul. Berbeda

dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengetahui penyelesaian politik agraria yang tidak berpihak pada rakyat (studi kasus pada sengketa lahan antara PTPN Cinta Manis dengan masyarakat desa Betung kecamatan Payaraman Ogan Ilir.

Mukmin Zakie, *“Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda”* (Zakie, 2016:40). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konflik agraria di Indonesia yang tidak pernah selesai, berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini mengetahui penyelesaian politik agraria yang tidak berpihak pada rakyat (studi kasus pada sengketa lahan antara PTPN Cinta Manis dengan masyarakat desa Betung kecamatan Payaraman Ogan Ilir.

Yoppie Christian, Arif Satria dan Satyawan Sunito, *“Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)”* (Sunito dkk, 2019:1). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara kerja perampasan alat produksi oleh kapital terhadap wargan Pari dan menganalisis kepentingan dari penetrasi kapital ke wilayah insular saja. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian skripsi ini mengetahui penyelesaian politik agraria yang tidak berpihak pada rakyat (studi kasus pada sengketa lahan antara PTPN Cinta Manis dengan masyarakat desa Betung kecamatan Payaraman Ogan Ilir.

Tim Kerja RUU Pengadilan Agraria, dkk., *“Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI Indonesia”* (Tim:2014:1). Buku ini menjabarkan latarbelakang dan gagasan munculnya pengadilan agrarid perspektif DPD RI Indonesia. Berbeda dengan penelitian

sebelumnya, skripsi ini mengetahui penyelesaian politik agraria yang tidak berpihak pada rakyat (studi kasus pada sengketa lahan antara PTPN Cinta Manis dengan masyarakat desa Betung kecamatan Payaraman Ogan Ilir).

Berdasarkan dari pemikiran di atas, tidak dapat di pungkiri lagi bahwa telah ada sebelumnya beberapa penelitian yang mengkaji tentang politik agraria dan agraria tanah itu sendiri. Akan tetapi belum ada penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian ini. Baik itu objek yang diteliti maupun lokasi penelitian.

F. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penulis erharap pemaca leih memahami konsep dan tujuan analisis yang penulis erikan dengan kerangka teori ini pemaca dapat memahami secara singkat dan jelas sehingga tidak memuat pemaca menunggu lama. untuk mengeksplorasi sifat analisis ini. Namun dalam kerangka teori makna keseluruhan dari analisis ini elum dijelaskan karena poin selanjutnya akan diahas pada a erikutnya sehingga untuk mementuk analisis diperlukan konsep teoritis yang terorganisir sehingga ada dampak dan minat. untuk pemaca.

Secara etimologis gerakan adalah suatu kegiatan sosial erupa suatu gerakan suatu jenis tindakan kelompok yaitu suatu kelompok informal yang erentuk organisasi skala esar atau individu-individu dengan fokus tertentu pada suatu masalah sosial udaya dan politik. dalam praktek menolak atau mengadvokasi perubahan sosial. (Widyanta, 2002).

Sedangkan politik menurut Deliar Noer (1983), Politik adalah seperangkat kegiatan atau sikap yang berkaitan dengan kekuasaan dan dimaksudkan untuk mempengaruhi dengan memodifikasi atau mempertahankan jenis struktur sosial.

Menurut Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko (1984) bahwa masyarakat adalah realitas objektif yang independen tanpa individu sebagai anggotanya. Perusahaan sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki beberapa faktor lain.

Menurut Sunarto (2004), Gerakan politik adalah perilaku kolektif yang dicirikan oleh kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau lembaga yang mementuknya. Ciri lain dari gerakan politik adalah penggunaan metode yang berada di luar institusi yang ada.

Menurut Maran (2001), gerakan politik adalah usaha yang kurang lebih dengan kekerasan dan terorganisir oleh sejumlah orang untuk membawa perubahan atau menentangnya. Oleh karena itu gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang terorganisir secara longgar tanpa sarana yang dilemakan untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Beberapa kasus memprovokasi gerakan masyarakat yaitu konflik tanah.

Dengan demikian dapat penulis analisis bahwa gerakan politik masyarakat adalah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat terkait isu-isu tertentu dengan tujuan untuk menolak atau pun mengkampanyekan terhadap kekuasaan.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau proses ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan mengolah menyajikan dan menganalisis data untuk mencari atau memeriksa keanaran pengetahuan yang digunakan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan fieldwork yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengeluarkan data dari lapangan. (Arikunto, 2010). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan manusia dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini memahas seluruh platform dan individu (Moleong, 2010).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data sebagai sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti langsung dari subjekresponden penelitian. Selain subjekresponden penelitian data primer juga dapat diperoleh dari jurnal ilmiah dalam dan luar negeri. (Hartinah, 2012:13). Sumber data utama penelitian ini adalah tokoh masyarakat perwakilan PTPN VII Cinta Manis dan masyarakat Desa Seri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir..

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk teratas yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya dalam bentuk publikasi. (Hartinah, 2012:18). Sumber data sekunder adalah dokumen berupa buku dan publikasi internet yang berisi uraian tentang kebijakan pertanahan dan sengketa pertanahan..

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan tanya jawab dengan informan langsung (sumber informasi) atau dengan perantara yang mengetahui masalah (suyek) yang akan diteliti secara mendalam. (Rozaq, 2012).

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumenter adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen baik yang sudah tersedia di lapangan maupun dokumen yang dihasilkan oleh peneliti berupa gambar salinan file rekaman film dan lain-lain. riset.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil akhir penelitian. Data diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah analisis kualitatif dari

data Miles dan Huerman yang dikutip oleh Salim. Tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Minimisasi data pada tahap ini peneliti memilih dan memfokuskan perhatiannya pada penyederhanaan abstraksi dan transformasi data mentah yang diperoleh (Sali, 2006:22). Setelah mewawancarai 20 informan peneliti menyaring data yang dianggap perlu untuk diperoleh atau ditolak. Data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan hasil penelitian yang diuraikan pada Bab IV.
- b. Penyajian data (data display). Peneliti mengemangkan deskripsi informasi terstruktur untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Menampilkan data atau menyajikan data yang biasa digunakan dalam langkah ini dalam teks naratif (Salim, 2006:22). Setelah reduksi data peneliti akan menyajikan data penelitian dalam bentuk teks naratif yang sesuai dengan temuan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang digunakan untuk penelitian ini.
- c. Menarik kesimpulan dan memverifikasi. Sejak awal pengumpulan data peneliti kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan mencatat aturan atau pola yang menjelaskan kemungkinan konfigurasi alur sea akyat dan postulat. Selama penelitian terus berlanjut setiap kesimpulan yang dicapai akan diuji secara terus menerus hingga tercapai suatu kesimpulan yang valid dan solid. (Salim, 2006:23). Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menarik

kesimpulan. Ketika data disajikan dalam bentuk naratif kesimpulan ditarik berdasarkan tujuan penelitian.

Untuk keasahan data penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Menurut Sutopo metode triangulasi merupakan metode yang paling umum digunakan untuk meningkatkan validitas dalam penelitian kualitatif. Ada empat jenis teknik segitiga yaitu:

- a. Triangulasi data artinya peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan banyak sumber data yang berbeda. Tahun
- b. Triangulasi metode adalah bagaimana peneliti memeriksa keasahan data dengan mengumpulkan data yang sejenis tetapi menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.
- c. Triangulasi Metode Peneliti (triangulation study) yaitu hasil penelitian baik data maupun kesimpulan mengenai perilaku atau keseluruhan dapat diperiksa keasahannya dari perilaku peneliti. Tahun
- d. Teori triangulasi melibatkan pengujian keasahan data dengan menggunakan sudut pandang lebih dari satu teori untuk membahas masalah yang sedang dipelajari dari mana dapat dianalisis dan ditarik menarik kesimpulan yang lebih komprehensif dan komprehensif. (2002:7-8).

Keasahan data dalam penelitian ini menggunakan teori triangulasi teknik. Ketika membahas masalah yang diteliti digunakan metode teori multi-sudut untuk menguji validitas data sehingga dapat menarik kesimpulan dan analisis yang lebih lengkap dan komprehensif.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian sistematika secara rinci yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang pengertian politik, jenis-jenis politik, politik agraria, undang-undang agraria dan pengertian sengketa, jenis-jenis sengketa.

BAB III adalah Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini berisi tentang letak geografis dan sejarah lokasi penelitian.

BAB IV adalah Hasil dan Pembahasan. Bab ini memuat 2 pembahasan yakni pertama mengenai politik agraria yang tidak berpihak pada rakyat (studi kasus pada sengketa lahan antara PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat desa Seri Bandung kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir. Kedua, penyelesaian politik agraria yang tidak berpihak pada rakyat (studi kasus pada sengketa lahan antara PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat desa Seri Banjung kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir.

Bab V adalah Penutup. Bab ini berisi penutup dari skripsi ini, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.